

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN No. 6 TAHUN  
2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERSPEKTIF**

***SIYASAH DUSTURIYAH* (STUDI KASUS DI PASAR  
SUKARAMAI KEC. MEDAN AREA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah & Ilmu Hukum Pada Jurusan Siyasa

Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum

UIN Sumatera Utara

**Oleh:**

**ANISA APRIANA**  
**0203163111**



**FAKULTAS SYARI'AH & ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2021**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN No. 6 TAHUN  
2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DI PASAR  
SUKARAMAI KEC. MEDAN AREA)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ANISA APRIANA**

**0203163111**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag**

**NIP. 19591015 199703 2 001**

**PEMBIMBING II**



**Afifah Rangkuti, SH, M.Hum**

**NIP. 19740527 200901 2 004**

**Mengetahui,**

**Kepala Jurusan Siyasah**



**Irwansyah, M.H**

**NIP. 19801011 201411 1002**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* (STUDI KASUS DI PASAR SUKARAMAI KEC. MEDAN AREA)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, serta apa saja yang membuat Peraturan Daerah Kota Medan ini tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut dan prespektif *Siyasah Dusturiyyah* terhadap peraturan tersebut. Rumusan masalah pada skripsi ini ialah, Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Pasar Sukaramai, Bagaimana Hubungan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Peraturan Daerah No.6 Tahun 2015 Mengenai Kebersihan. Dalam penelitian ini penulis mengamati secara langsung tidak terealisasikan Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2015 merupakan peraturan yang lama, namun pembuangan sampah yang terjadi di daerah pasar sukaramai ini masih terlihat ada, tidak berjalan dan tidak ada tindakan dari pihak pemerintah untuk mengatasi masalah sampah ini. Dalam prespektif *siyasah dusturiyyah* yang membahas tentang perundang-undangan Negara dan mengatur hubungan timbal balik antara Pemerintah dengan warga Negara serta hak-hak warga yang wajib dilindungi. Dan tidak berjalannya Peraturan itu di jalan A.R. Hakim (Pasar Sukaramai) yang membuat masyarakat sekitarnya merasakan keberatan terhadap penumpukan sampah di sepanjang jalanan, yang di lakukan oleh para pedagang dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris atau pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dengan melihat langsung ke lapangan, dan pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan secara sosiologis, dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara kepada orang yang menumpuk sampah dan masyarakat yang berada di kawasan pasar sukaramai tersebut. Dengan dilengkapi data primer yang di peroleh langsung di lapangan dan dari data skunder yang bersangkutan. Dalam pembahasan ini, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum terealisasikan atau tidak berjalan maksimal pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, parasahabat, keluarga serta pengikut-Nya yang rela berkorban untuk mengeluarkan umat Islam dari kebodohan menuju kebahagiaan yang di ridhoi Allah Swt yaitu dengan Agama Islam.

Atas izin Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Tata Negara (Siyasah), pada program strata satu (SI) Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi, saran serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
3. Irwansyah, MA, selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Syofiaty Lubis, MA selaku Sekertaris Jurusan, Zaid Alfauzah, M.H selaku Exsekertari Jurusan Siyasah yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi I dan Afifah Rangkuti, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan ilmu, saran, masukan dan arahan kepada penulis dengan baik agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mahmuddin dan Ibunda Rahmadhani Matanari yang selalu mencurahkan kasih sayang, membesarkan, mendidik dan memberikan materil yang terbaik untuk penulis. Dukungan, semangat dan motivasi yang selalu diberikan dengan penuh keikhlasan, kesabaran yang disertai dengan iringan doa tiada henti hingga penulis dapat menempuh pendidikan yang tinggi.

7. Kedua saudara kandung penulis, Abangda Agus Dian Tama, S.kom dan Adisyah Putra, SE beserta saudari ipar penulis, Dwi Juliani, S.kom dan Annisa Almabina Rangkuty, A.md, S.Pd, yang selalu menyayangi penulis, memberikan materil serta motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Zainal Arifin, SE, selaku Kepala Seksi Operasional Dinas Kebersihan Kota Medan yang telah membantu penulis dan memberikan informasi kepada penulis mengenai pengelolaan persampahan di Kota Medan.
9. M. Ilhamsyah Putra Nst, SH, yang selalu menemani penulis melakukan riset lapangan hingga mencari data untuk penulisan skripsi ini dan memberikan semangat, motivasi kepada penulis agar penulis dapat menuangkan segala kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Siyash C stambuk 2016, terkhusus Delvi Suryani, Anas Sumawan Sembiring, Masna Hsb, Selfia Afriantita, SH., Suci Wulandari, Putri Rahmadhani, Dwi Ambar Pertiwi, Selawati, M. Azri, Maqomam Mahmuda, SH., Ahmad Fazri. Terimakasih atas segala kenangan serta perjuangan yang dilakukan bersama-sama dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Semoga Allah meridhai segala ilmu yang telah kita dapatkan.
11. KKN 04 (2019) Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Langkat khususnya Hasri Ainun Habibie, S.Pd dan Luthfiah Wahid, serta Keluarga Dunia Berputar Muhammad Yusri, S.P dan Mirna Wahyuni Marbun, S.Pd yang

selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semua, semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Medan, 10 Juni 2021

Penulis

Anisa Apriana

0203163111

## DAFTAR ISI

<b>Persetujuan .....</b>	<b>i</b>
<b>Ikhtisar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>

### **Bab IPendahuluan**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Terdahulu .....	14
F. Metodologi Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	22

### **Bab IILandasan Teori**

A. Pengertian Sampah .....	24
B. Dasar Hukum Mengenai Kebersihan Lingkungan .....	34
C. Sanksi bagi pelanggar/perusak lingkungan .....	38

### **Bab IIIGambaran Umum Lokasi Penelitian**

A. Keadaan Demografi di KelurahanSukaramai II Kec. Medan Area.....	42
--	----



B. Keadaan Sosial Budaya di Kelurahan Sukaramai II .....	47
C. Keadaan Ekonomi dan Potensi di Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area .....	48
D. Keadaan Pendidikan di Kel. Sukaramai II Kec. Medan Area .....	49

#### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

A. Temuan Kasus di Pasar Sukaramai .....	50
B. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Pasar Sukaramai .....	53
C. Bagaimana Hubungan Fiqh Dusturiyah dengan Peraturan Daerah mengenai Kebersihan .....	58

#### **Bab V Penutup**

<b>Kesimpulan .....</b>	<b>63</b>
<b>Saran .....</b>	<b>65</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>67</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>71</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan lingkungan hidup akhir – akhir ini sudah semakin ramai dibicarakan terlebih manusia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi makanan, minuman dan barang lainnya dari sumber daya alam. Aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang disebut dengan sampah.

Secara terbatas yang dimaksud dengan sampah adalah tumpukan bahan bekas dan sisa tanaman (seperti; dedaunan, sisa sayuran, sisa bahan buangan lain) atau sisa kotoran hewan dan benda – benda yang dibuang lainnya. Dalam pengertian yang luas, sampah dapat diartikan sebagai benda yang dibuang, baik yang berasal dari alam maupun dari hasil proses teknologi.

Menurut *wikipedia* sampah merupakan material sisa yang tidak dapat lagi di pakai. Sampah merupakan produk yang tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali sehingga tidak di butuhkan dan banyak dibuang oleh masyarakat.<sup>1</sup> Sedangkan menurut *KBBI* sampah adalah barang atau benda, limbah yang dibuang karena tidak terpakai lagi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wikipedia diakses pada 12 Juni 2020 Pukul : 12;15 Wib

<sup>2</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (IndoBook Citra Media; Bogor). Hal. 732.

Menurut Reksosoebroto (1990), bahwa penanganan sampah yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Manfaat lain penanganan sampah yang baik adalah menurunkan 90% angka kehidupan lalat menurunkan 90% angka kehidupan tikus menurunkan 30% angka kehidupan nyamuk, menurunkan 70% angka kerusakan jembatan dan menurunkan 90% angka kerusakan pipa bangunan.<sup>3</sup>

Keuntungan pembuangan sampah dapat diperoleh dari pengelolaan sampah yang baik dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- 1) Dari segi sanitasi, menjamin tempat kerja yang bersih, mencegah tempat berkembang biaknya vektor hama penyakit dan mencegah pencemaran lingkungan termasuk timbulnya pengotoran sumber air;
- 2) Dari segi ekonomi, mengurangi biaya perawatan dan pengobatan sebagai akibat yang ditimbulkan sampah, lingkungan yang bersih dapat meningkatkan gairah bekerja dan menambah produktivitas kesehatan manusia.
- 3) Dari segi estetika, menghilangkan pandangan tidak sedap dipandang mata dan menghilangkan bau – bau yang tidak enak untuk dihirup, mencegah keadaan lingkungan yang kotor dan tercemar. Penanganan

---

<sup>3</sup>Reksosoebroto, “ *Hygiene dan Sanitasi* ” (Jakarta : Akademi penilaian Kesehatan Teknologi Sanitas, 1990) hal. 21

sampah yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar.<sup>4</sup>

Menurut penulis sampah ialah sisa bahan buangan yang sudah tak terpakai lagi seperti dedaunan, sisa sayuran, bahan – bahan bekas lainnya yang tidak bisa digunakan kembali dan menimbulkan bau tak sedap, bila ditumpuk akan mencemari lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif salah satunya yaitu mengurangi estetika sudut kota.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Pada sampah itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam antara lain, kemasan yang berbahaya atau sulit diurai oleh proses alam.<sup>5</sup>

Kondisi ini memaksa pemerintah daerah memacu kemampuan untuk mengelola sampah dengan baik dan benar berdasarkan pengetahuan yang relatif minim. Namun sayangnya, niat baik pemerintah itu masih jauh dari memadai bila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Sehingga penanganannya pun dipahami hanya

---

<sup>4</sup>*Ibid*, 22

<sup>5</sup>Hermawati dkk, “*Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*” (Yogyakarta 2015). hal. 42.

sebatas urusan memindahkan, membuang dan memusnahkan dengan cara yang sangat tidak aman dan cenderung mencemari lingkungan.<sup>6</sup>

Selain masalah sampah, tidak di pungkiri pula masalah banjir dan kemacetan, ketiga ini merupakan masalah klasik di Kota Medan sejak dahulu belum terealisasi. Dengan jumlah penduduk yang begitu besarnya, kebutuhan akan air bersih juga sangat besar jumlahnya, sedangkan kenyataannya akses untuk mendapatkan air bersih sangatlah sulit.

Sungai – sungai yang ada di Kota Medan berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang status sungai Deli dan sungai Babura adalah sungai yang merupakan kawasan lindung yang kini sudah tercemar, maka pemerintah berupaya dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kawasan sumber daya air, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air.<sup>7</sup>

Daya rusak air ini disebabkan adanya aktivitas kegiatan/usaha disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu sampai hilir, antara lain pembangunan hotel dan mall serta industri pabrik.

Mengenai pengelolaan sampah pemerintah sudah menciptakan regulasi yang kuat dan mengikat sehingga dalam hal ini masyarakat harus memiliki rasa takut apabila ingin melakukan perusakan lingkungan yang salah satunya adalah

---

<sup>6</sup>*Ibid* hal. 43.

<sup>7</sup>Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Status Sungai Deli dan Sungai Babura.

melakukan pembuangan sampah sembarangan. Undang – undang No. 8 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (d) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Ini berarti Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengangkutan sampah mulai dari sumber hingga tempat pengelolaan akhir (*TPA*).<sup>8</sup>

Sedangkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Pasal 32 menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan, menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa seizin Walikota, dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.<sup>9</sup>

Di Kecamatan Medan Area sendiri terdiri dari 12 kelurahan. Kondisi kelurahan yang memiliki jumlah penduduk 100.262 Jiwa<sup>10</sup> ini memicu timbunan sampah yang cukup tinggi dan bertebaran di beberapa titik jalanan kota, dimana timbunan sampah banyak terlihat di kelurahan. Sukaramai II yang beralamat Jl. AR Hakim (*Pasar Sukaramai*) di karenakan tempat tersebut ialah pasar tradisional yang menyebabkan timbunan sampah cukup tinggi. Semakin tinggi jumlah penduduk disuatu daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat sampah yang dihasilkan. Jika sampah dikelola dengan baik maka tidak ada penumpukan

---

<sup>8</sup>Undang – undang No. 8 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (d)

<sup>9</sup>Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang pengelolaan persampahan  
Pasal 32

<sup>10</sup>BPS (*Badan Pusat Statistik*) Kota Medan, Tahun 2020

sampah di pinggir jalan yang menimbulkan berbagai masalah seperti masalah estetika karena bau yang ditimbulkan, menjadi tempat berkembangbiakan penyakit.

Berbagai upaya dari pihak Pemko Medan dan Pemda Medan terus dilakukan untuk menangani masalah ini. Inovasi dan teknologi yang telah berkembang era ini dapat berperan dalam menangani masalah sampah yang terjadi di kota Medan saat ini, serta kepedulian warga juga harus bisa ditingkatkan untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Jumlah warga yang peduli terhadap lingkungan saat ini kian bertambah, namun tetap saja tidak sebanding dengan volume sampah setiap harinya yang di hasilkan di Pasar tradisional Sukaramai ini. Kesadaran warga Kota untuk peduli terhadap lingkungan sampai saat ini masih dikatakan sangat rendah. Kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan dan juga membakar sampah, turut memperparah kondisi lingkungan saat ini.<sup>11</sup>

Islam mendorong kesadaran individu terhadap kebersihan itu sangat tinggi. Sampai dikeluarkan assunnah tentang kebersihan, itu artinya Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebersihan.

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara terhadap salah satu pekerja dinas kebersihan yang bernama *Lutfhi Shabani Nasution* sebagai tukang sapu jalan pada 13 Mei 2020 Pukul 14:02

الإِسْلَامُ نَظِيفٌ فَتَنْظَّفُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا النَّظِيفُ (البیهقرواہ)<sup>12</sup>

Artinya: “Islam itu bersih, maka jadilah kalian orang yang bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang-orang yang bersih” (H.R. Baihaqi).

Pemahaman tentang kebersihan yang mendasar ini menumbuhkan kesadaran individual untuk pemilahan sampah, pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri, serta mengurangi konsumsi.

Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan lingkungan sebagai sebuah lingkungan dimana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik ketika berpergian ataupun mengasingkan diri, sebagai tempat dia kembali, baik dalam keadaan rela atau terpaksa.<sup>13</sup> Dalam al-Qur’an terdapat ayat tentang kewajiban manusia menjaga kelestarian lingkungan.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan ber-doalah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rumah Allah amat dekat kepada orang – orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf : 56)<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Abd Wadud,( 2011:60) diriwayatkan Thabarani dalam kitabnya al-Mu’jam al-Ausa

<sup>13</sup>H.A Mufrod Teguh Mulyo Journal “Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam” di akses pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 15:04

<sup>14</sup>Kementrian Agama, Al-quran dan Terjemahan ( Penerbit SABIQ; Depok).



Bahkan yang namanya “*merusak bumi*” adalah sifat yang tercela, tidak menunaikan amanat dalam me-makmurkan bumi, Allah berfirman :

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya : “*Dan apabila ia berpaling (dari mukamu). Ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman – tanaman dan binatang ternak dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*” (QS. Al-Baqarah : 205)<sup>15</sup>

*Al-Iman al-Qurtubi ra* mengatakan “Ayat ini sesuai dengan keumumannya, mencakup segala kerusakan baik di bumi maupun kerusakan terhadap harta dan Agama.

Dalam perkembangannya, Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan bidang kajian yang membatasi pembahasannya (biasanya) pada peraturan perundang – undangan yang dituntut oleh *ihwal* <sup>16</sup> kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip Agama dan merupakan relasi kemaslahatan manusia oleh karenanya hubungan yang strategis antara pemerintah dan rakyatnya sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan perundang – undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya sesuai kaidah :<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Kementrian Agama, Al-quran dan Terjemahan ( Penerbit SABIQ; Depok).

<sup>16</sup>*Ihwal (Perihal).*

<sup>17</sup>Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman, *Melestarikan Lingkungan Hidup, Disali dari Majalah al-furqon* No.143 Ed.7 Th.Ke-13\_1435H Download eBook Islam di [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com). Tanggal 15 April 2020 –Pukul 14:00

## تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan” (Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah).<sup>18</sup>

Di dalam buku *fiqh siyasah* karangan Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag dijelaskan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara. Dan di dalam bagian ini dibahas antara lain, *konsep-konsep konstitusi* (undang - undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang - undangan dalam suatu Negara), *Legislasi* (bagaimana cara perumusan undang-undang), *Lembaga Demokrasi* dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>19</sup>

Salah satu Badan yang berperan dalam perumusan undang - undang ataupun peraturan daerah di Kota Medan yakni DPRD Kota Medan, yang mana mereka didalam pengertian *siyasah dusturiyah* disebut juga dengan lembaga demokrasi atau syura. Disebabkan menumpuknya sampah dan tercemarnya lingkungan sehingga meresahkan masyarakat khususnya di Pasar Sukaramai Jl. AR.Hakim Kelurahan. Sukaramai II Kecamatan. Medan Area, lalu Pemerintah setempat beserta Anggota DPRD Kota Medan Merumuskan, Merancang dan Membuat suatu Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Sampah yang baik dan

---

<sup>18</sup>H. Sukanan, Ust. Khairudin *Terjemahan kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah (Mabadi' Awwaliyyah)* Kitab asal : Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawais Al Fiqhiyah

<sup>19</sup>Muhammad Iqbal., “*FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Dokrin Polisi Islam Edisi Pertama*” (Penerbit Jakarta; PRENADAMEDIA GROUP)., hal. 177

benar, yang mana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan. Di buatnya Peraturan Daerah ini agar bisa terealisasi di lingkungan masyarakat sekitar.

Pengertian maslahat menurut *Amir Syarifuddin* ialah perbuatan – perbuatan yang mendorong manusia kepada kebaikan, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>20</sup>

<sup>21</sup>Menurut *Al-Gazali* sebagaimana yang dikutip Amir Syarifuddin, Masalah diartikan sebagai:

<sup>22</sup>المحافل مقصود الشرع

Artinya : “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum).”

Tujuan syara dalam menetapkan hukum ada lima yaitu:

- 1) *Hifdz al-din* (menjaga Agama)
- 2) *Hifdz al-nafsh* (menjaga diri/jiwa)
- 3) *Hifdz al-aql* (menjaga akal)
- 4) *Hifdz al-maal* (menjaga harta)
- 5) *Hifdz al-nashl* (menjaga keturunan)

---

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *”Ushul Fiqh”* (Jakarta; Prenada Media Group 2008) hal., 323-324

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *”Ushul Fiqh”* (Jakarta; Prenada Media Group 2008) hal., 325

<sup>22</sup>Al-Imam Al-Gazali dikutip Amir Syarifuddin mengenai *Maslahah*

Pengelolaan persampahan yang tidak sesuai prosedur yang telah dibuat dapat menimbulkan dampak buruk kesehatan bagi masyarakat setempat, semua itu tidak terlepas dari tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Medan yang bersinergi dengan masyarakatnya. Oleh karenanya, dalam konteks politik, *hifdz al-biah* (melindungi lingkungan) sangat relevan dan menjadi landasan filosofis bagi *fiqh siyasah, maliyyah, dauliyyah* dan *dusturiyyah*.<sup>23</sup> Dengan demikian tujuan syara ditambah dengan *hifdz al-biah* (melindungi lingkungan).

Dengan demikian pengelolaan persampahan dan perlindungan lingkungan hidup berada pada tingkatan *dharuri* sehingga wajib dilaksanakan dalam rangka melindungi, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara lingkungan yang kelak mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Suatu kewajiban bagi seluruh elemen untuk bersama – sama berusaha melindungi dan mengelolah sampah demi kemaslahatan lingkungan hidup dengan sebaik mungkin dengan cara–cara yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan yang dilakukan oleh perorangan maupun bersama–sama, baik dari sudut Agama, budaya dan sosial demi kesehatan masyarakat dan kita semua.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengadakan Penelitian guna mengetahui antara teori dengan kondisi di lapangan. Maka dari itu penulis tertarik dengan Judul. **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan Perspektif Fiqh Dusturiyah (Studi**

---

<sup>23</sup>*Ibid*,hal.324

**Kasus di Pasar Sukaramai Kec. Medan Area)”. Agar meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Pengelolaan Persampahan untuk menciptakan lingkungan yang bersih serta tidak menumpuk dan menimbun sampah di area Kota Medan.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Pasar Sukaramai?
- 2) Bagaimana Hubungan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Peraturan Daerah No.6 Tahun 2015 Mengenai Kebersihan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 di Pasar Sukaramai Kelurahan. Sukaramai II Kecamatan Medan Area.

- 1) Untuk mengetahui penyimpanan atau perwadahan sampah di Pasar Sukaramai, Kelurahan. Sukaramai II Kecamatan Medan Area.
- 2) Mengetahui pengumpulan sementara dan pengangkutan sampah di Pasar Sukaramai, Kelurahan. Sukaramai II Kecamatan Medan Area.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan, berharap dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

##### **1) Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang Pengelolaan Persampahan guna mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian dan sejenisnya.

2) Secara Ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan di bidang ini.

3) Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.

4) Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai untuk menjaga kondisi lingkungan agar tidak tercemar dan menimbulkan efek bau di masyarakat.

5) Manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang lebih konkrit.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Dalam pembahasan skripsi ini merujuk pada buku, serta skripsi-skripsi ataupun kajian terdahulu yang membahas seputar pengelolaan persampahan.

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis me-review beberapa kajian skripsi dan karya tulis ilmiah terdahulu. Maka dalam penyusunan skripsi ini dilengkapi dengan beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan, antara lain :

1. Olland Langgak Marudut Limbong “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan (Studi Tentang Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan Medan Selayang) Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Departemen Administrasi Negara Ekstensi Universitas Sumatera Utara 2016.

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah /kebersihan di kantor camat medan selayang. Penelitian ini menggunakan teori yang didasarkan pada variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan karakteristik masalah, kebijakan dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan metode teknis analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan sampah di kecamatan medan selayang masih terdapat beberapa hambatan salah satunya kesadaran masyarakat dalam mengelolah sampah, selain itu kondisi ekonomi dan sosial masyarakat juga dapat mempengaruhi implementasi pengelolaan sampah.

## **F. Metodologi Penelitian**

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, sistematis, dan efisien maka diperlukan langkah-langka yang sistematis pula. Adapun langkah-langka pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan kenyataan yang benar. Yang mana penelitian yang dilakukan tidak jauh sebelumnya dari penelitian lainnya yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi dan pokok pikiran dan pendapat lainnya sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti dalam hal peneliti menggunakan metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu penelitian.<sup>24</sup> Deskriptif Kualitatif yakni sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaanobyek penelitian dengan memusatkan perhatian pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya, kemudian melakukan representasi obyektif dengan mendeskripsikan gejala-gejala data atau

---

<sup>24</sup>Salim, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung; Citapustaka Media, 2008), hal.41



fakta sebagai adanya representasi data dengan diiringi pengolahan agar dapat diberikan penafsiran.<sup>25</sup>

Di dalam penelitian kualitatif ini perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realita dan kondisi di lapangan.<sup>26</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan peran implementasi perda tentang pengelolaan persampahan terhadap pencemaran lingkungan yang di dapatkan dari kata-kata bersumber dari hasil informasi penelitian.

### **1. Metode pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis empiris. Adapun pengertian dari pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah, yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan dan penelitian ini juga dilakukan dengan meneliti data-data lapangan yang ada.

Pendekatan yuridis yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku mengenai implementasi pengelolaan persampahan serta pendekatan empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan

---

<sup>25</sup>Hadiri, Mimi Martini., *"Penelitian Terapan"*, (Yogyakarta;Gajah Mada University Pers, 1999), hal.74

<sup>26</sup>Sekiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Perdana Publishing: Medan, 2016) hal.48

dari penerapan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 di Pasar Sukaramai, Kecamatan Medan Area.

Jadi penelitian dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan dilapangan dengan menggunakan data-data, metode dan teknik penelitian lapangan.

## **2. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*sosial appoch*).

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini yaitu beralamat di Pasar Sukaramai Kelurahan. Sukaramai II Kecamatan. Medan Area Kota Medan. Alasan diadakan penelitian dilokasi tersebut antara lain:

- a. Karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan Persampahan yang sesuai dengan penelitian.
- b. Karena di lokasi tersebut dapat bersedia diwawancarai sebagai narasumber untuk mendapatkan sumber data yang dibutuhkan pada saat penelitian.

## **4. Informan Penelitian**

Informan penelitian dari proposal ini ada 2 yaitu;

- a. Petugas/pekerja Pesapu Jalan dan Pengangkut Sampah dari Dinas Kebersihan dan Dinas Kecamatan Medan Area yaitu;
  - Bapak Lutfi Syahbani Nst
  - Bapak Lukman Siregar
  - Bapak Rusdianto
- b. Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Pasar Sukaramai yaitu;
  - Ibu Lina Matondang
  - Bapak Yakub Rahman
  - Bapak Nurdin
  - Ibu Rina Hutabarat
- c. warga yang sedang berbelanja di Pasar Sukaramai yaitu;
  - Ibu Rahmadhani
  - Ibu Susilawati
  - Ibu Erni Koto
  - Delvi Suryani

## **5. Sumber data**

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut sebagai berikut :

- a. Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.  
Data ini dapat di peroleh melalui pengamatan langsung maupun

melalui hasil wawancara kepada sejumlah masyarakat sekitar, antara lain:

- Dinas Kebersihan Pemko Medan
- Masyarakat di Area Pasar Sukaramai Kelurahan. Sukaramai II Kecamatan. Medan Area, Terbagi menjadi dua golongan yaitu:

- Tokoh Masyarakat Setempat
- Tokoh Pedagang Pasar/Kaki Lima

b. Sumber data Sekunder yaitu sumber lain yang membantu atau pelengkap dari sumber primer yang berfungsi untuk mengembangkan data dalam penelitian ini, anantara lain yaitu:

- Buku-buku yang terkait dengan pengelolaan persampahan.
- Data-data berupa arsip dan dokumen penting yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier adalah bahan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan.

## **6. Teknik pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah Metode Penelitian Lapangan. Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *Purpos-ive Sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau

*Random Sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>27</sup> Untuk membantu pengumpulan data penulis menggunakan metode pengumpulan data diantaranya yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan –pencatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran untuk menangkap gejala yang diamati.<sup>28</sup>

Metode observasi ini adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data dengan wawancara dan mengamati secara langsung tentang Pengelolaan Persampahan di Pasar Sukaramai Jl. AR. Hakim Kelurahan. Sukaramai II Kecamatan. Medan Area.

b. Metode Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, metode wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antar peneliti dengan responden.<sup>29</sup>

Metode ini dilakukan penulis untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan pertanyaan kepada informan yang sudah dipersiapkan tetapi cara penyampaian langsung secara ebas dan terikat oleh pedoman wawancara.

---

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta;Sinar Grafika, cet, 7. 2016) hal. 106

<sup>28</sup>Rianto Andi, “*Metode Penelitian Sosial dan Hukum*”, (Jakarta;Granit, 2004), hal.70

<sup>29</sup>Sutrisno Hadi, “*Metodologi Researchs* ( Jakarta : Erlangga, 1967 ) hal.95

### c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku-buku serta dokumen penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk menyimpan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan masalah yang terjadi.

Penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data tentang kondisi umum daerah penelitian dan data-data yang masih ada kaitannya dengan pengelolaan persampahan.

### d. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualifikasi yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Moh Nazir, "*Metode Penelitian*" (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998), hal. 34

Analisis deskriptif ini digunakan dengan cara menguraikan data merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dalam dari permasalahan yang ada dengan pendekatan berfikir induktif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Proposal penelitian ini, akan disusun dalam lima bab, Tiap-tiap bab akan terdiri dari berbagai sub-sub yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika.

### **Bab II : Landasan Teori**

Dalam bab ini, penulis melangkah kepada gambaran umum tentang masalah dari latar belakang dari masalah sampah dan pengelolaan sampah.

### **Bab III : Gambaran Lokasi Penelitian**

Dalam bab ini, penulis akan megkaji tentang gambaran umum, lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, kondisi demografis, kondisi daerah sampah.

#### Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara terperinci tentang hasil penelitian dilapangan yakni gambaran lokasi penelitian dan penulis memaparkan penelitian terhadap pandangan sejumlah masyarakat mengenai pengelolaan sampah di daerah pasar sukaramai.

#### Bab V : kesimpulan dan Saran

Sebagai bab penutup atau bab bab akhir dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengambil uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian, dalam bab ini juga berisi saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Sampah

Sampah atau *waste* (Inggris) memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair dan gas.

Secara sederhana, jenis sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Sampah dipilih menjadi sampah organik dan anorganik. *Sampah organik* atau sampah basah ialah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan sampah sisa dapur. Sampah jenis ini sangat mudah terurai secara alami (*degradable*). Sementara itu, *sampah anorganik* atau sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terurai (*undegradable*) seperti, karet, plastik kaleng dan logam merupakan bagian dari sampah kering.<sup>31</sup>

Menurut Undang – undang No. 18 Tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>32</sup> kemudian didasari dengan jumlah penduduk indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam

---

<sup>31</sup>Hartono Rudi “*Penanganan & Pengolahan Sampah*”( Seri; Industri Kecil.), hal.5.

<sup>32</sup>Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan.

menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam semakin beragam. Subtansi Undang-undang ini yang terkait dengan langsung mengenai pengelolaan sampah yaitu pasal 19 yang mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Fatwa MUI tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dijelaskan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang karena sifatnya, konsentrasi atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2008) sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau cacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau terbuang.

Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuan Nya menurut perhitungan yang amat sempurna. Allah SWT tidak menciptakannya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni dengan sia-sia tanpa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya (udara, air, tanah tumbuhan dan lain-lain) senantiasa bertasbih kepada Allah SWT dengan cara sendiri-sendiri. Allah senantiasa mengingatkan kepada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang ditetapkan), dan menyuruh kita agar menjaga

---

<sup>33</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 7 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah.

itu demi keseimbangan ekosistem dunia. Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-a'raf ayat 85 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan di terima) dan harapan (akan di kabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”*(QS. Al-a 'raf : 85).<sup>34</sup>

Di dalam *fiqh al-Bi'ah* (fiqh lingkungan) adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berpengalaman berdasarkan pemikirannya untuk mencapai tujuan kemaslahatan kehidupan yang berbeda.

Fiqh lingkungan adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi dan tanah dengan melindungi hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh ekosisten hutan yang ada di dalamnya

---

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan*( Jakarta : Pustaka Media, 2009) , hal.162.

adalah bagian dari Agama dan menjadikannya sebagai upaya kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai Ibadah.<sup>35</sup>

### 1. Jenis – jenis sampah

Jenis – jenis sampah dapat dikelompokkan sebagai berikut :<sup>36</sup>

a. *Solid waste* disebut *refuse* (sampah basah)

Umumnya terdiri dari bahan-bahan organik yang secara teknis dapat dimusnahkan.

b. *Liquid waste* disebut *waste water* (air buangan/sampah cair).

c. *Atmospheric waste* (gas buangan).

d. *Human waste* merupakan sebagai *human excreta disposal*.

e. *Manure* (kotoran hewan).

f. Sampah berbahaya (bahan berbahaya dan beracun = B3).

Pengelompokan berbagai jenis sampah tersebut penting untuk memudahkan dalam teknis pembuangan/pemusnahannya (*waste management*). *Waste management* adalah pengelolaan, pembuangan dan pemusnahan sampah menurut pengelompokan berbagai jenis-jenis sampah. Pengelompokan jenis-jenis sampah dapat dibedakan menurut

1. Sistem manajemen pengelolaannya.

2. Komposisi kimianya.

---

<sup>35</sup>Sukarni, “*Fiqh Lingkungan Hidup*” (Jakarta; Pustaka Ilmu 2011), hal. 212.

<sup>36</sup>Alexander Lucas Slamet Ryadi., “*Ilmu Kesehatan Masyarakat*” (Ed I – Yogyakarta: CV Andi Offset 2016)., hal. 102.

3. Sampah *organik* (sisa sayuran/sisa makanan).
4. Sampah *anorganik* (kaleng-kaleng bekas).
5. Sifat-sifat pemusnahannya;
6. Sampah *degradable* (pemusnahan secara alamiah).
7. Sampah *nondegradable* (tidak dapat atau sulit dimusnahkan secara alamiah sampah plastik).
8. Sampah mudah terbakar (kertas).
9. Sampah tidak mudah terbakar (kaca,botol kosong).
10. Bentuk sampah;
11. Sampah basah (mudah dimusnahkan secara alamiah) disebut sebagai *garbage*.
12. Sampah kering disebut sebagai *rubbish*.

*Garbage* adalah sisa makanan yang disebut juga sebagai sampah basah, terdiri dari bahan-bahan organik dan mudah membusuk.

*Rubbish* adalah sampah kering yang mudah dibakar maupun yang tidak dapat dibakar. Sampah yang mudah dibakar antara lain kertas, karet, keju, plastik dan daun-daun kering, sedangkan yang tidak dapat dibakar meliputi kaca, kaleng dan benda-benda logam.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 103.

## 2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sampah

Menurut Sumantri Arif (2010) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah sampah, yaitu;<sup>38</sup>

### a. Jumlah Penduduk

Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung sampah semakin berkurang. Demikian dengan semakin meningkatnya aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan juga akan semakin banyak.

### b. Sistem Pengumpulan atau Pembuangan Sampah yang Dipakai

Pengumpulan dengan menggunakan gerobak lebih lambat dibandingkan dengan truk, oleh sebab itu di daerah yang menggunakan gerobak sebagai pengangkut sampah akan menumpuk lebih banyak sampah dibandingkan dengan daerah yang menggunakan sistem angkut sampah lewat truk.

### c. Pengambilan Bahan-bahan pada Sampah untuk Dipakai Kembali

Metode ini dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu. Frekuensi pengambilan dipengaruhi oleh keadaan, bila harganya tinggi dan tinggi pula minat pemakaiannya kembali, sehingga sampah yang tertinggal pun akan semakin berkurang.

---

<sup>38</sup>Sumantri Arif., “*Kesehatan Lingkungan*”,(KENCANA;PT Kharisma Putra Utama 2010)., hal. 62-63.

d. Faktor Geografis

Lokasi tempat pembuangan apakah di daerah peunungan, lembah, pantai atau didataran rendah. Biasanya jumlah sampah lebih banyak ditemukan didaerah dataran rendah yang padat penduduk.

e. Faktor waktu

Jumlah sampah per hari bervariasi menurut waktu, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak daripada dipagi hari. Namun, didaerah pedesaan tidak bergantung terhadap waktu.

f. Faktor Musim

Pada musim penghujan, sampah banyak terlihat tersangkut pada selokan dan pintu air. Sampah yang biasanya tersangkut kebanyakan sampah plastik, ranting pohon.

g. Kebiasaan Masyarakat

Bila suatu kelompok masyarakat suka mengonsumsi satu jenis makanan atau tanaman, maka sampah dari tanaman itu akan meningkat jumlahnya.

h. Kemajuan Teknologi

Akibat kemajuan teknologi jumlah sampah dapat meningkat. Contohnya, plastik, kardus, rongsokan AC, TV, kulkas dan sebagainya.

I. Jenis Sampah

Semakin tinggi tingkat penduduk, kebudayaan disuatu daerah maka semakin kompleks pula ancaman dan jenis sampah yang dihasilkan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal. 64.

## **1. Pengelolaan Sampah**

Menurut Perda No. 6 tahun 2015 pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

## **2. Tahap Pengumpulan dan Penyimpanan di Tempat Sampah**

Sampah yang ada dilokasi sumber (kantor, rumah tangga, hotel, pasar dan sebagainya) ditempatkan dalam tempat sampah. Sampah basah dan sampah kering sebaiknya dikumpulkan dalam tempat yang terpisah untuk memudahkan pemusnahannya.

Adapun tempat penyimpanan sementara (tempat sampah) yang digunakan harus memenuhi persyaratan berikut ini :

- a. Konstruksi harus kuat dan tidak mudah bocor.
- b. Memiliki tutup dan mudah dibuka tanpa mengotori tangan.
- c. Ukuran sesuai sehingga mudah diangkut oleh satu orang.

Dari tempat penyimpanan ini, sampah dikumpulkan kemudian dimasukkan kedalam *dipo* (rumah sampah). *Dipo* ini berbentuk bak besar yang digunakan untuk menampung sampah rumah tangga. Pengelolaannya dapat diserahkan pada pihak pemerintah.

Untuk membangun suatu *dipo*, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya:



- a) Dibangun di atas permukaan tanah dengan ketinggian bangunan setinggi kendaraan pengangkut sampah.
  - 1. Memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu untuk mengambil sampah.
  - 2. Memiliki lubang ventilasi yang tertutup kawat halus untuk mencegah lalat dan binatang lain masuk ke dalam *dipo*.
- b) Ada keran air untuk membersihkan.
- c) Tidak menjadi tempat tinggal atau sarang lalat dan tikus.
- d) Mudah dijangkau masyarakat.
- e) Pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan dua metode;
  - 1. Sistem *duet*: yaitu tempat sampah kering dan sampah basah.
  - 2. Sistem *trio*: tempat sampah basah, sampah kering, dan tidak mudah terbakar.

### **3. Tahap Pengangkutan dan Penampungan Sementara**

Menurut Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2015, Tempat Penampungan Sementara (*TPS*) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengelolaan dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.

Dari *dipo*<sup>40</sup>, sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau pemusnahan sampah dengan menggunakan truk pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota.

---

<sup>40</sup>*Dipo* (Rumah Sampah).

## 1. Tempat Pembuangan Akhir

Menurut Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2015, Tempat Penampungan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Menurut Sumantri Arif dalam pengelolaan sampah dapat digunakan berbagai metode dari yang sederhana hingga tingkat teknologi tinggi. Metode pembuangan akhir yang dapat dilakukan, antara lain;<sup>41</sup>

### a. *Sanitary Landfil*

*Sanitary landfil* adalah sistem pemusnahan yang paling baik. Dalam metode ini, pemusnahan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan selapis demi selapis. Dengan demikian, sampah tidak berada di ruang terbuka dan tentunya tidak menimbulkan bau atau menjadi sarang binatang pengerat.

### b. *Open dumping*

*Open dumping* adalah cara pembuangan akhir yang sederhana karena sampah hanya ditumpuk di tanah lapang, jurang, atau tempat sampah.

### c. *Control landfil*

*Control landfil* adalah peralihan antara teknik *open dumping* dan *sanitary landfil*. Pada metode ini sampah ditimbun dan diratakan. Setelah timbunan sampah penuh dilakukan penutupan terhadap hamparan sampah tersebut dengan tanah dan dipadatkan.

## Dampak Sampah yang Ditimbulkan

---

<sup>41</sup>Arif Sumantri “*Kesehatan Lingkungan*” (KENCANA-Depok 2010), hal. 69-71.

a. Terhadap Kesehatan :

1. sebagai sarana penularan penyakit.
2. Sebagai tempat perkembangbiakan vektor penyakit.
3. Mengganggu dan menyebabkan kecelakaan.

b. Terhadap Lingkungan:

1. Estetika lingkungan sekitar menjadi tidak indah.
2. Proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas tertentu yang menimbulkan bau busuk
3. Pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara.
4. Pembuangan sampah kedalam saluran pembuangan air akan menyebabkan aliran air terganggu dan saluran air menjadi tersumbat.
5. Apabila musim hujan datang, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir.
6. Air banjir dapat menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum seperti; jalan ,jembatan, dan saluran air.

## **B. Dasar Hukum Mengenai Kebersihan, Kesehatan dan Pengelolaan Sampah**

### **1. Dasar Hukum**

Pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan persampahan. Hal ini merupakan landasan hukum bahwa pemerintah memiliki peran penting yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan persampahan.<sup>42</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 6 Butir (d) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Ini berarti pemerintah memiliki point penting dan bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah dan memfasilitasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah agar peraturan ini bisa terealisasi di Kota Medan dan di lingkungan masyarakat tepatnya di Pasar Sukaramai.<sup>43</sup>

Bicara mengenai tanggungjawab, di dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Medan

---

<sup>42</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H ayat 1

<sup>43</sup>Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 6 Butir (d)

BAB IV  
Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab  
Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Persampahan memiliki tanggung jawab yaitu:

- a. Melakukan penataan di sekitar tempat pengelolaan persampahan dengan memperhatikan;
  1. Kawasan penyangga; dan
  2. Kawasan budidaya.
- b. Melaksanakan pengelolaan persampahan terpadu;
- c. Mengembangkan kerja sama anatar Kabupaten/Kota dalam pengelolaan persampahan;
- d. Memfasilitasi dalam melakukan kerja sama pengelolaan persampahan;
- e. Penentuan lokasi pengelolaan sampah terpadu;
- f. Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan;
- g. Memberikan advokasi, pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi pengelolaan persampahan terpadu;
- h. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan pengelolaan persampahan;
- i. Memfasilitasi dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayah;
- j. Mendorong pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan, dan
- k. Mengadakan penyuluhan dalam rangka merubah cara pandang terhadap sampah.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 9

Dalam pengelolaan persampahan setiap orang berhak;

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. Memanfaatkan dan mengelola sampah untuk kegiatan ekonomi
- c. Berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan persampahan;
- d. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan persampahan.
- e. Mendapatkan perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- f. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan persampahan secara baik dan berwawasan lingkungan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 10

Dalam pengelolaan persampahan setiap yang berkewajiban;

- a. Mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- b. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya;
- c. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi; dan
- d. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.

#### Pasal 11

- 1) Setiap orang atau Badan wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan dalam pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- 2) Pengelolaan kawasan pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.<sup>44</sup>

## 2. Dasar Hukum Islam

Dalam Islam, kebersihan merupakan konsekuensi dari pada *Iman* (ketaqwaan) kepada Allah SWT, yaitu berupaya menjadikan diri seorang muslim suci (bersih). Dengan upaya tersebut seseorang diharapkan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : “....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (Q.S. Al-Baqarah : 222)

---

<sup>44</sup>Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan

Adapun Hadits Rasulullah SAW menyebutkan bersuci itu sebagian dari Iman, hadits ini bersumber dari Abi Malik Al-Ash'ariya diriwayatkan Imam Muslim dijelaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari Iman;

عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شرط لا إيمان. روه المسلم ١٢٥

Artinya: “dari Abi Maik Al-Ash’Ariya bersabda Rasulullah SAW. Kebersihan itu sebagian dari Iman. (HR. Muslim No. 135).<sup>45</sup>

Dalam hadits lain diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Malik Al Harits bin Al ‘Ashim Al ‘Asy’ari.

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، أَوْ تَمْلَأُ — وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: “dari Abu Malik Al Harits bin ‘Ashim Al ‘Ay’ari Radhiyallahu ‘anhu ia berkata : Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Kesucian itu sebaian dari Iman, “Alhamdulillah” memberatkan timbangan, “Subhanallah walhamdulillah” memenuhi ruang antara langit dan bumi, Sholat itu cahaya, shadaqah itu bukti nyata, sabar itu pelita, Al-Qur’an itu Hujjah (yang membela atau menghujat). Setiap manusia bekerja sampai ada yang menjual dirinya, hingga ia jadi merdeka atau bahkan celaka. (HR. Muslim no. 223).<sup>46</sup>

### C. Sanksi Bagi Pelanggar dan Perusak Lingkungan

<sup>45</sup>Hadits Riwayat Muslim No. 135 dikutip dari buku Hadits Arba’in, Sholahuddin Press:Jakarta

<sup>46</sup>Hadits Riwayat Muslim No. 223 dikutip dari buku Hadits Arba’in, Sholahuddin Press:Jakarta

Sejalan dengan perkembangan jaman dan pembangunan Kota, maka sampah yang dihasilkan jumlahnya akan meningkat terus – menerus di beberapa daerah termasuk perkotaan, sehingga resiko kerusakan lingkungan akan semakin tinggi dan gaya hidup tidak sehat pun akan dialami.

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat dan bersih, maka dari itu pihak Pemerintah Dinas Kebersihan bertanggung jawab untuk mengelola persampahan dengan baik dan benar.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Medan dijelaskan tentang ketentuan Pidana apabila orang atau badan membuang sampah sembarangan dan melanggar hukum maka dikenakan sanksi di dalam Perda No. 6 Tahun 2015 telah membuat ketentuan pidana pada pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah). Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah)”.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Pasal 35 ayat (1), (2).



Selanjutnya ketentuan pidana juga dijelaskan pada Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan pada pasal 40 ayat (1), (2) menyatakan bahwa “Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (2) menyatakan bahwa “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.<sup>48</sup>

Kemudian dijelaskan juga pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan pada bagian kedua ketentuan hukum ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap muslim *wajib* menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*”. Ayat (2) “Membuang sampah

---

<sup>48</sup>Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan Pasal 40 ayat (1), (2).

sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya *haram*”. Ayat (3) “Pemerintah dan Pengusaha *wajib* mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup”. Ayat (4) “Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya *wajib kifayah*”.<sup>49</sup>

Dengan dibuatnya Peraturan dari pihak Pemerintah untuk memberi sanksi pidana atau denda bagi si pelanggar dan si pembuang sampah, agar meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

---

<sup>49</sup>Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Persampahan bagian kedua ayat (1),(2),(3),(4).

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Keadaan Demografi**

##### **1. Mengenal Kota Medan, Kecamatan Medan Area**

Kota Medan adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Kota ini merupakan Kota terbesar ketiga yang berada di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta Kota terbesar di luar Pulau Jawa. Secara geografis terletak diantara kordinat  $2^{\circ} 27' - 2^{\circ} 44'$  Lintang Utara dan  $98^{\circ} 35' - 98^{\circ} 44'$  Bujur Timur. Posisi Kota Medan ada di bagian Utara Provinsi Sumatera Utara dengan topografi miring ke arah Utara dan berada pada ketinggian tempat 2,5 - 37,5 m<sup>2</sup> di atas permukaan laut.

Kota ini merupakan pintu bagi arus penumpang dan juga perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar Negeri. Bagi Kota Medan, kegiatan perdagangan bersamaan dengan aktivitas hotel dan restoran menjadi motor penggerak roda perekonomian kota ini. Dengan adanya pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua setelah Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Indonesia.

Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi dengan jalan tol dan kereta api, membuat akses menuju tempat tersebut lebih mudah dan efisien. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandaa dengan akses kereta api. Berbatasan lanngsung dengan Selat Malaka, Kota Medan

menjadi Kota dengan perdagangan, Industri, dan Bisnis yang penting untuk meningkatkan prekonomian di Indonesia.

Secara administratif Kota Medan mempunyai 21 Kecamatan dan 115 Kelurahan yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Di sebelah barat Kecamatan Medan Kota berbatasan dengan Medan Maimun, di sebelah timur Medan Denai, di sebelah selatan Medan Amplas dan di sebelah utara Medan Area. Pada tahun 2020 Kota Medan mempunyai penduduk sebesar 2.524.321 jiwa dan luasnya yaitu 26.510 Ha kemudian kepadatan penduduknya mencapai 9.522,22 jiwa/km<sup>2</sup> yaitu terdapat 21 kecamatan di Kota Medan termasuk juga di dalamnya Kecamatan Medan Area.<sup>50</sup>

Kecamatan Medan Area adalah salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Kecamatan Medan Area ini berbatasan langsung dengan kecamatan Medan Kota di sebelah selatan dan barat, Kecamatan Medan Perjuangan di sebelah utara, dan Kecamatan Medan Denai di sebelah timur.

Kecamatan Medan Area merupakan salah satu kecamatan di kota medan yang mempunyai luas sekitar 4,42 km<sup>2</sup>. Daerah ini merupakan kawasan perdagangan dan centra sejarah masa kerajaan melayu yaitu kesultanan Deli yang cukup terkenal.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang di pimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 24

---

<sup>50</sup><https://pemkomedan.go.id/artikel-9137-jumlah-penduduk-medan-2983868-jiwa.html> di akses pada Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 13:01

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh Camat.”<sup>51</sup>

## **2. Sejarah Berdirinya Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area**

Pasar sukaramai adalah pasar tradisional yang terletak di kecamatan Medan Area, pasar sukaramai pertama kali berdiri pada tahun 1968 dengan luas tanah 3.150 persegi dan luas bangunan yakni 1.439 persegi. Pada tahun 1997 pasar sukaramai ditutup sementara oleh pihak pemerintah karena melakukan penataan kembali atau renovasi pada bangunannya untuk menunjang kegiatan perdagangan. Pada tahun 2009 bangunan pasar sukaramai mengalami kebakaran dan akhirnya dibangun kembali di lokasi yang sama pada tahun 2012, dan pada saat ini pasar sukarami dikelola oleh Pemerintah Daerah (PD) Pasar Kota Medan.<sup>52</sup>

Pasar sukaramai adalah tempat para penjual dan pembeli berkumpul untuk membeli barang – barang dagangan secara langsung, pasar ini berkawasan di persimpangan Jalan A. R. Hakim dan Jalan Sutrisno. Pasar ini termasuk pasar kelas I dimana pasar yang di bangun secara permanen maupun semi permanen dan mempunyai fasilitas yang cukup seperti tempat parkir, kamar mandi dan aliran listrik.

---

<sup>51</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “*ketentuan pasal 1 angka 24*”.

<sup>52</sup>Rifki Andika Journal “*Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Di Pasar Tradisional Sukaramai*” di akses pada hari Minggu Tanggal 24-01-2021.

Sukaramai adalah sebuah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Area, Medan Sumatera Utara. Daerah ini berkembang sebagai daerah jasa perdagangan jual beli, permukiman dan lain – lainnya, di kelurahan sukaramai II terdiri dari 16 (enam belas) lingkungan. Adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rel Kereta Api
- Sebelah Selatan : Jl. Besi
- Sebelah Barat : Jl. Sutrisno
- Sebelah Timur : Jl AR. Hakim

Pembagian wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per Km<sup>2</sup>

Kecamatan Medan Area dalam angka 2020

**Tabel 1 jumlah penduduk di Kec.Medan Area**

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk Per (Km <sup>2</sup> )
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)			
1.	Pasar Merah Timur	5 629	5 770	11 399	0.75	15 197
2.	Tegal Sari II	3 517	3 436	6 953	0.24	28 971
3.	Tegal Sari III	5 353	5 310	10 663	0.35	30 465
4.	Tegal Sari I	4 401	4 555	8 956	0.24	37 316
5.	Suka Ramai I	4 247	4 317	8 564	0.35	24 468
6.	Kota Matsum II	4 729	4 463	9 192	0.27	34 044
7.	Kota Matsum IV	4 245	4 322	8 567	0.27	31 729
8.	Kota Matsum I	5 891	5 985	11 876	0.34	34 929
9.	Sei Rengas Permata	1 744	1 958	3 702	0.26	14 238
10.	Suka Ramai II	3 142	3 446	6 588	0.31	21 251
11.	Sei Rengas II	2 424	2 661	5 085	0.36	14 125
12.	Pandau Hulu II	4 166	4 551	8 717	0.48	18 160
<b>Jumlah</b>		<b>49 488</b>	<b>50 774</b>	<b>102 262</b>	<b>4.22</b>	<b>23 758</b>

Sumber : Badan Statistik Kota Medan 2020

### 3. Pelaksanaan penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2020 dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu kepada Ibu Rina Hutabarat, Ibu Lina Sihombing, Delvi Suryani, Bapak Yakub Rahman, Bapak Zainal Arifin, SE. Yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan di jalan A.R.Hakim kecamatan medan area, sehingga dapat dilihat

dari Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai dari peraturan itu. Sehingga dari beberapa elemen masyarakat merasa keberatan terhadap dampak negative dari pembuangan sampah ini.

## **B. Keadaan Sosial dan Budaya**

Penduduk Kota Medan dapat digolongkan pada kelompok masyarakat heterogen, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis suku, Agama, ras dan golongan – golongan. Kumpulan masyarakat Kota Medan terdiri atas suku Melayu, Padang, Batak (Mandailing, Toba, Karo, Simalungun, Angkola) Jawa, Aceh, Thionghoa, India. Kumpulan masyarakat Kota Medan yang heterogen terbagi – bagi di berbagai lokasi di Kota Medan, hal ini disebabkan karena pada awalnya lokasi tersebut merupakan daerah tumbuh dan berkembangnya suku di Kota Medan. Perbedaan lokasi tersebut bukan merupakan gambaran penduduk yang terpecah belah melainkan sebagai pemersatu diantara semua suku di Kota Medan. Sama halnya juga di kelurahan Sukaramai yang mayoritas penduduknya berdasarkan Suku, Ras dan Agama.

Dari sisi lain, heterogenitas menjelaskan bahwa:

1. Kota Medan adalah kota berkarakter Internasional sejak lama, kultur antara asia timur, asia selatan dan asia tenggara, diyakini bahwa kulturasi ini erat kaitannya dengan pertumbuhan perdagangan barang dan jasa di Kota Medan sejak dahulu.



2. Kota Medan kondusif bagi tumbuhnya kulturasi berbagai kebudayaan, hidup berdampingan secara damai dan juga mengartikan bahwa Kota Medan aman bagi berbagai jenis kegiatan ekonomi oleh berbagai pihak dari berbagai wilayah regional lainnya.

### **C. Keadaan Ekonomi dan Potensi**

Kegiatan perdagangan atau jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang memegang peranan penting dalam membangun perekonomian di daerah Sukaramai ini, di karenakan kelurahan ini berada di antara pasar tradisional sukaramai sehingga sektor perekonomiannya berada di lingkup perdagangan.

### **D. Keadaan Pendidikan**

Pendidikan ialah suatu hal yang menjadi perhatian dan permasalahan dalam masyarakat. Sarana dan prasarana pendidikan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting, terlebih lagi pada zaman modern. Kini diakui sebagai kegiatan yang menentukan suatu prestasi, karena majunya suatu daerah terlihat dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikannya, baik formal maupun informal. Sarana pendidikan di Kecamatan Medan Area ini cukup memadai, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3Jumlah Sekolah PAUD, TK Negeri dan Swasta, SD Negeri dan Swasta menurut Kelurahan Tahun 2020**

No .	Kelurahan	PAUD	TK Negeri	TK Swasta	SD Negeri	SD Swasta	Jumlah
1.	Pasar Merah Timur	1	0	2	4	3	10
2.	Tegal Sari II	1	0	3	2	1	7
3.	Tegal Sari III	1	1	2	5	3	12
4.	Tegal Sari I	0	0	2	0	1	3
5.	Suka Ramai I	1	0	2	6	1	10
6.	Kota Matsum II	1	0	4	2	3	10
7.	Kota Matsum IV	4	0	2	0	1	7
8.	Kota Matsum I	1	0	2	2	0	5
9.	Sei Rengas Permata	0	0	2	0	2	4
10.	Suka Ramai II	0	0	2	0	0	2
11.	Sei Rengas II	0	0	1	0	1	2
12.	Pandau Hulu II	1	0	2	2	2	7
<b>Jumlah</b>		11	1	26	23	18	79

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS 2020)

**Tabel 4Jumlah sekolah SMP, SMA dan SMK di Kecamatan Medan Area**

No .	Kelurahan	SMP Negeri	SMP Swasta	SMA Negeri	SMA Swasta	SMK Negeri	SMK Swasta	Jumlah
1.	Pasar Merah Timur	0	3	0	2	0	0	5
2.	Tegal Sari II	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tegal Sari III	0	1	0	1	0	2	4
4.	Tegal Sari I	0	1	0	0	0	2	3
5.	Suka Ramai I	0	1	0	0	0	0	1
6.	Kota Matsum II	0	2	0	1	0	1	4
7.	Kota Matsum IV	0	1	0	1	0	0	2
8.	Kota Matsum I	0	0	0	0	0	0	0
9.	Sei Rengas Permata	0	2	0	1	0	0	3
10.	Suka Ramai II	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sei Rengas II	0	1	0	1	0	1	3
12.	Pandau Hulu II	1	2	1	3	0	0	6
<b>Jumlah</b>		1	14	1	10	0	6	31

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Kasus di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area**

Pasar tradisional sukaramai atau sering disebut pajak sukaramai ini terletak di Kecamatan Medan Area, persis di persimpangan Jalan A.R.Hakim, Jalan Denai, Jalan Sutrisno dan Jalan Aksara itu termasuk pasar yang cukup padat dikunjungi oleh pembeli setiap harinya.

Pasar ini juga merupakan pasar yang lokasinya strategis dikarenakan berada di persimpangan jalan, dengan berjumpanya berbagai penyedia barang kebutuhan dan pembeli. Dikarenakan kepadatan penduduknya, pasar ini juga menghasilkan debit sampah yang cukup tinggi.

Terlihat jalanan di sekitar Pasar (pajak) Sukaramai kecamatan Medan Area ini kurang teratur atau bisa disebut “*Semrawut*” dikarenakan banyak terlihat tumpukan sampah di sepanjang jalan A.R.Hakim itu di sebabkan pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan di depan gedung pasar sukaramai tersebut.

Lapak-lapak pedagang yang terbuat dari kayu dan terpal berbentuk seperti payung-payung yang melintang di jalanan tampak memenuhi hampir setengah dari bahu jalanan, begitu juga terlihat sampah yang menumpuk hingga ke tengah jalan. Sehingga kendaraan juga harus memperlambat laju kendaraannya, ditambah

lagi saat lampu merah terhenti di persimpangan ini membuat kemacetan sepanjang jalanan, terkadang pengendara saat terhenti di jalanan ini harus mencium aroma menyengat tak sedap dari tumpukan sampah yang sudah hampir membusuk, sungguh ini ironis karena membawa dampak penyakit bagi siapa yang menghirup aromanya.

Ibu Rina Hutabarat salah seorang pedagang cabai di Pasar Sukaramai mengatakan, selama ini pihak dari Dinas Kebersihan tidak menyediakan tong sampah bagi pedagang, sehingga pedagang seenaknya saja membuang dan menumpuk sampah di sepanjang jalan. Ia berharap dari pihak Dinas Kebersihan secepatnya mengangkut tumpukan sampah yang berserakan. Pasalnya tumpukan sampah yang hampir membusuk itu tentunya mengganggu, baik pengguna jalan maupun pedagang itu sendiri. “Memang selama ini banyak pedangan yang membuang sampah di kawasan ini karena tidak ada larangan, kadang kalau pedagang punya tong sampah bambu hanya sedikit muatannya, padahal yang rugi kami sendiri (pedagang) yang menghirup baunya”.<sup>53</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan Ibu Lina Matondang salah seorang pedang Ikan Asin di pinggir jalan A.R.Hakim, ia membenarkan bahwa dirinya sering membuang sampah di bahu jalan, dikarenakan tidak ada larangan dari pihak manapun yang diterima oleh pedanggang untuk membuang sampah di area tersebut. “Kami mau membuang sampah dimana lagi dek, di sini tidak di sediakan tong sampah, kami disini membayar iuran per hari nya untuk pengangkutan

---

<sup>53</sup>Wawancara Pribadi dengan Ibu Rina Hutabarat Pada tanggal 16-01-2021

sampah, karna gak ada tong sampah jadi kami tumpuk aja sampahnya. Jadi kalau mengeluarkan bau itu karena petugas pengangkut sampah yang telat datang. Kami pun tidak mau sampah lama-lama menumpuk begini.”<sup>54</sup>

Sementara itu, Delvi Suryani warga Medan Area yang sering melintas di kawasan Pasar Sukaramai mengungkapkan bahwa kalau dirinya merasa sangat terganggu dengan tumpukan sampah yang berserakan di tepi dan bahu jalanan. Dia mengatakan sampah yang bertebaran sering kali mengeluarkan bau tak sedap (bau busuk). Menurutnya, sampah berserakan karena pedagang yang berjualan di pinggir jalan membuang sampah sembarangan di tambah lagi pengangkutan sampah sering datang terlambat.<sup>55</sup>

Jadi cukup jelas dari paparan di atas menjelaskan bahwa di kawasan Pasar Sukaramai ini sangat semrawut di karenakan sampah yang menumpuk di bahu jalanan Kota. Sehingga banyak dampak negatif yang signifikan yang timbul akibat tumpukan sampah tersebut, salah satunya bau tak sedap yang di alami warga saat melintas di kawasan ini. Padahal kita tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu akan di kenakan sanksi pidana dan denda. Lantas Undang-undang No. 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan Persampahan dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan yang sudah ada, mengapa tidak berjalan pada kenyataannya di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area tersebut.

---

<sup>54</sup>Wawancara Pribadi dengan Ibu Lina Matondang Pada tanggal 16-01-2021

<sup>55</sup>Wawancara Pribadi dengan Delvi Suryani (Seorang Mahasiswi yang bertempat tinggal di Kecamatan Medan Area) Pada Tanggal 6 Desember 2020 Pukul 11:10 WIB.

## **B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Di Pasar Sukaramai**

Kebijakan Peraturan Kota Medan mengenai pengelolaan persampahan dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 merupakan peraturan yang di buat oleh Pemerintah Daerah yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Medan dalam menunjang terwujudnya Kota Medan sebagai Kota yang bersih, sehat, nyaman, indah dan ramah lingkungan.

Dalam melaksanakan Peraturan ini Pemerintah membuat tentang pelayanan persampahan yang di berikan pemerintah kepada masyarakat, yang bertujuan untuk melayani sampah yang di hasilkan penduduknya yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih.

Menurut pasal 1 ayat 9 dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 6 tahun 2015 “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”

Dilihat dari hasil penelitian Implementasi Peraturan itu di lihat dari aspek Dinas Kebersihan Kota Medan dan pelayanan yang sudah dilakukan namun, dari penelitian lapangan yang di dapat peneliti bahwa pengimplementasian tersebut belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, seperti banyaknya tumpukan sampah di bahu jalanan kota, yang terdiri dari sampah sisa sayuran pedagang, sampah rumah tangga, di bahu jalan A.R.Hakim Kecamatan Medan Area.

Menurut pasal 1 ayat 17 menjelaskan bahwa “Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir disingkat TPA, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu” tidak ada sama sekali di sediakan pihak pemerintah dan Dinas Kebersihan sedangkan di dalam pasal 4 menyebutkan adanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab pihak pemerintah daerah yang mana menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 6 tahun 2015 yang bermuat mengenai tugas Pemerintah dalam pasal 6 berbunyi;

“Pemerintah Daerah mempunyai tugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan; memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah; melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah”.

Sedangkan dalam pasal 7 ayat (a) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menyelenggarakan pengelolaan persampahan, berbunyi:

“Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan persampahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah”.

Lanjut pada pasal 7 ayat (e) menyebutkan adanya izin untuk pengelolaan sampah, kemudian merujuk pada peraturan Undang – undang No. 8 Tahun 2008 pada Pasal 6 ayat (d) menyatakan bahwa:

“Tugas Pemerintah adalah melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah”.<sup>56</sup>

Ini berarti Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengangkutan sampah mulai dari sumber hingga tempat pengelolaan akhir (*TPA*). Tetapi di lihat di lapangan kondisi tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pihak Pemerintah Kota Medan seperti tong sampah tidak ada, sehingga itu yang menjadi sebab akibat tidak terlaksananya peraturan tersebut.

Dari hasil wawancara kepada Bapak Zainal Arifin, SE. bagian Kepala Seksi Operasional di Dinas Kebersihan Kota Medan. Beliau mengatakan bahwa pihak dinas kebersihan sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menangani masalah sampah ini, namun banyaknya faktor penghambat salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi “Dinas Kebersihan menyediakan beberapa unit mobil pengangkut sampah, tetapi yang seharusnya menyediakan tong-tong sampah sementara itu dari pihak kecamatan atau bagian pasar itu sendiri dan kurangnya

---

<sup>56</sup>Undang – undang No. 8 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (d)



kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi itu cukup tinggi dan menjadi faktor penumpukan sampah”.<sup>57</sup>

Sehingga pengelolaan sampah itu belum efektif dan belum berjalan sesuai Peraturan Daerah Kota Medan, dapat di lihat dari beberapa hasil wawancara dengan para pedagang di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area,

Salah satunya Bapak Yakub Rahman Seorang Pedagang Kelapa dipasar sukaramai beliau mengatakan bahwa “pengelolaan sampah di pasar sukaramai tersebut kurang bersih dan efektif, dikarenakan tidak semua sampah yang bertumpuk diangkut oleh dumptruk pengangkut sampah jadi kurang bersih. Walaupun dalam sehari truck pengangkut sampah itu datang dua kali dalam sehari, yang pertama pagi menjelang siang dan dimalam hari. Mereka tidak mengangkut semua sampah dan masih ada yang tersisa dan kami disini sebagai pedagang yang sudah bayar iuran sebesar Rp. 2000/per hari tidak mau mengumpulkan sampah sisa serakan dari pengangkutan itu sehingga sampah masih banyak bertebaran kemana-mana tambah lagi di tiup angin. Kami para pedagang berharap dari pihak pemerintah memberikan fasilitas seperti tong-tong sampah yang besar jadi kami enak mengumpulkan sampah kami disatu titik agar mudah dalam pengangkutannya.”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin, SE (Kepala Seksi Operasional Dinas Kebersihan Kota Medan) Pada hari Selasa, 22 Desember 2020 Pukul 10:36 WIB.

<sup>58</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Yakub Rahman (Seorang Pedagang Kelapa di Pasar Sukaramai) pada hari Senin, 10 Agustus 2020 Pukul 11:01 WIB.

Kemudian penulis mencoba menggali informasi lagi kepada pedagang kaki lima terkait pengelolaan sampah di pasar sukaramai tersebut.

Dari informasi yang di dapat dari Ibu Siti Hastuti Pedagang Buah menerangkan bahwa“saya perlu disediakannya sarana dan prasarana yang memadai ya seperti bak/tong sampah itu, apalagi saya berjualan buah terkadang buah-buahan yang saya jual ada yang membusuk lalu di campakkan (dibuang) dan menumpuk sampah begitu saja dikarenakan kami yang berjualan disini sudah membayar uang untuk pengangkutan sampah. Kalaupun sudah ada perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah seharusnya bak sampah sudah ada disediakan untuk kami para pedagang disini walaupun hanya satu bak sampah itu tetapi dengan ukuran yang cukup menampung sampah-sampah disini”.<sup>59</sup>

Menarik kesimpulan diatas bahwa baik masyarakat ataupun pedagang bersikap memaksa terhadap fasilitas pembuangan sampah yang dimana kesadaran masyarakat kurang terhadap larangan membuang sampah yang terdapat di dalam peraturan daerah no. 6 tahun 2015.

---

<sup>59</sup>Hasil Wawancara Pribadi dengan Ibu Siti Hastuti Pedagang Buah di Pasar Sukaramai Pada Tanggal 16-01-2021

### **C. Hubungan *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Mengenai Kebersihan**

*Siyasah dusturiyyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dimana pada bagian ini membahas masalah antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *kesiyasahan* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga yang wajib dilindungi.

Point penting yang termaktub dalam perumusan undang-undang dasar ialah jaminan atas hak asasi manusia, dimana setiap anggota masyarakat dan harus mempunyai persamaan kedudukan dimata hukum sehingga tidak ada perbedaan antara sosial, budaya, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan konsep dari *fiqh dusturiyyah*.

Menurut *siyasah Dusturiyyah* terhadap Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2015 merupakan suatu peraturan yang harus dipatuhi masyarakat. *Siyasah Dusturiyyah* adalah bidang ilmu yang membahas peraturan perundang-undangan negara, dalam hal ini dibahas juga antara konsep-konsep konstitusi,

lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>60</sup>

*Fiqh al-Bi'ah* (lingkungan) ialah bagian dari *fiqh dusturiyyah* yang membahas mengenai tentang lingkungan dan kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkembang. Melindungi seluruh ekosistem yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan Agama. Sebaliknya, jika mengabaikan lingkungan sama halnya dengan melakukan tindakan tercela yang di larang oleh Agama.

Adapun dalam bentuk pemerintahan Islam, sebutan Khalifah (Kepala Negara atau Imam) hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah dalam mengurus dan mengatur keadaan setempat guna mencapai kemaslahatan tersebut maka diambil contoh dari salah satunya ialah menjaga kebersihan lingkungan yang membutuhkan peraturan agar pelaksanaannya berjalan secara sistematis. Oleh sebab itu agar aturan yang sudah ada dapat dijalankan oleh lembaga pemerintah, maka harus adanya seorang pemimpin. Dimana di dalam *fiqh dusturiyyah* sebutan pemimpin ialah *ulil amri*.

---

<sup>60</sup>Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*" (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001), hal. 4

Seperti firman Allah SWT dalam (Q.S. An-nisa :59) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء / ٤ : ٥٩)

Artinya : *“Hai orang – orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah rosul (nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qu’an) dan rosul (sunnahnya), jika kamu benar- benar beriman kepada allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.<sup>61</sup> (QS. An-Nisa :59).

Menurut Abdul Wahab al-Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud masalah umum umat Islam adalah segala yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dalam bidang perundang-undangan, keuangan dan Moneter, Peradilan, Eksekutif, masalah dalam Negeri ataupun hubungan Internasional.<sup>62</sup>

Di dalam Al-Qur’an firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* ( Jakarta : Pustaka Media, 2009) .

<sup>62</sup>Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah Doktrin Politik Islam” Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) hal.5

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat; “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah : 30).<sup>63</sup>

Adapun hadis tentang kebersihan yang diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi

Waqqos ra dari Rasulullah Swt bersabda :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَنَظِّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ

Artinya : “Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu.”(HR. At- Turmudzi).<sup>64</sup>

Dapat disimpulkan, Siyash Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam pembahasan Siyash Dusturiyah ini sangat luas

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahan* ( Jakarta : Pustaka Media, 2009) .

<sup>64</sup>Hadis Riwayat at-Tirmizi:2723 di kutip dari Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Hal. 4.

sehingga Siyasa Dusturiyah ini dibatasi dengan membahas masalah perundang-undangan.

Dalam permasalahan yang sudah ada pihak pemerintah merancang, membentuk dan membuat suatu Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan yang menyatakan pelarangan pembuangan sampah sembarangan dan akan memberikan fasilitas sarana prasarana pengelolaan sampah, dalam hal ini peraturan tersebut tidak berjalan dan tidak terealisasi di lapangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks yang melibatkan pelaku utama yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha (pedangang). Permasalahan yang timbul saling terkait antara satu dengan yang lainnya sehingga diperlukan pendekatan secara komprehensif dan melibatkan pelaku utamanya yaitu pemerintah. Di kota Medan sendiri tepatnya dipasar sukaramai persoalan mengenai sampah lebih komplek, dikarenakan tidak adanya keterlibatan dari pengambilan kebijakan pada saat Sini. Jika di biar-biarkan terus menerus maka tidak mustahil adanya gundukan sampah di berbagai sudut kota Medan ini. hal ini tentunya dapat memperburuk kondisi lingkungan terutama estetika kota Medan. Perilaku dan kurangnya kedisiplinan masyarakat serta keterbatasan pelayanan pembuangan sampah membuat sebagian toko-toko dan para pedagang dipasar sukaramai melakukan pembuangan sampah pada tempat-tempat yang tidak semestinya.
2. Dalam Islam sendiri juga sudah jelas membuat kerusakan pada bumi sangat di larang oleh Allah Swt, sampai di keluarkannya beberapa hadis untuk menjaga kebersihan itu artinya menjaga kebersihan itu wajib, baik menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri dan iman. Dalam konteks ini *siyasah dusturiyah* hanya sebagai penekanan pada bagian peraturannya



saja yaitu hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, artinya dalam menangani kasus permasalahan persampahan di Kota Medan ini pihak Pemerintah dan rakyatnya harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman melalui aturan yang sudah ada.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data maupun analisis yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan persampahan di Kota Medan yang dimana Peraturan ini diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2015 yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menetapkan suatu aturan dapat dikatakan belum berjalan atau terealisasi karena masyarakat masih banyak melakukan pembuangan sampah serta kurang akan kesadaran terhadap peraturan ini. Adapun saran dari penulis agar menjadi masukan bagi Pemko Medan untuk berbenah menjadi Kota yang Bersih dan Nyaman.

## **B. Saran**

1. Dinas Kebersihan Kota Medan harus memberikan sosialisasi secara merata dan mendalam tentang kebijakan pengelolaan sampah agar masyarakat dapat mengetahui adanya kebijakan ini dan bertanggung jawab menjaga kebersihan dan pengelolaan persampahan.
2. Memberikan sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah di bahu jalanan A.R.Hakim (Pasar sukaramai). Guna menunjang proses

pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara menuju tempat pembuangan akhir.

3. Memberikan sanksi kepada masyarakat mengenai pembuangan sampah secara sembarangan. Serta Mempertegas bagian penegak hukum agar peraturan daerah ini berjalan sesuai isi peraturan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abd Wadud,( 2011:60) diriwayatkan *Thabarani* dalam kitabnya al-Mu'jam al-Ausa

Alexander Lucas Slamet Ryadi (2016) "*Ilmu Kesehatan Masyarakat*" (Ed I – Yogyakarta: CV Andi Offset).

Al-Imam Al-Gazali dikutip Amir Syarifuddin mengenai *Maslahah*

Amir Syarifuddin (2008) "*Ushul Fiqh*" (Jakarta; Prenada Media Group).

Arif Sumantri (2010) "*Kesehatan Lingkungan*" (KENCANA-Depok).

BPS (*Badan Pusat Statistik*) Kota Medan, Tahun 2020

Departemen Agama RI (2008)*Al-quran dan terjemahan* ( Jakarta : Pustaka Media)

H. Sukanan, Ust. Khairudin *Terjemahan kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah (Mabadi' Awwaliyyah)*Kitab asal : Mabadi' Awaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawais Al Fiqhiyah

H.A Mufrod Teguh Mulyo Journal "*Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam*" di akses pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 15:04

Hadiri, Mimi Martini (1999) "*Penelitian Terapan*", (Yogyakarta;Gajah Mada University Pers).

Hadis ini di kutip dari Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.

Hadits dikutip dari buku Hadits Arba'in, Sholahuddin Press:Jakarta

Hartono Rudi "*Penanganan & Pengolahan Sampah*" (Seri; Industri Kecil).

Hasil Wawancara Dengan Bapak Yakub Rahman (Seorang Pedagang Kelapa di Pasar Sukaramai) pada hari Senin, 10 Agustus 2020 Pukul 11:01 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Arifin, SE (Kepala Seksi Operasional Dinas Kebersihan Kota Medan) Pada hari Selasa, 22 Desember 2020 Pukul 10:36 WIB.

Hasil Wawancara Pribadi dengan Ibu Siti Hatuti Pedagang Buah di Pasar Sukaramai Pada Tanggal 16-01-2021

Hasil Wawancara terhadap salah satu pekerja dinas kebersihan yang bernama *Lutfhi Shabani Nasution* sebagai tukang sapu jalan pada 13 Mei 2020 Pukul 14:02

Hermawati dkk (2015) *“Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan”* (Yogyakarta).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (IndoBook Citra Media; Bogor).

Kementrian Agama, Al-quran dan Terjemahan ( Penerbit SABIQ; Depok).

Moh Nazir (1998) *“Metode Penelitian”* (Jakarta;Ghalia Indonesia).

Muhammad Iqbal (2001) *“FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Dokrin Polisi Islam Edisi Pertama”* (Penerbit Jakarta; PRENADAMEDIA GROUP).

Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang pengelolaan persampahan Pasal 32

Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Pasal 35 ayat (1), (2).

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan

Reksosoebroto (1990) “ *Hygiene dan Sanitasi* ” (Jakarta : Akademi penilaian Kesehatan Teknologi Sanitas).

Rianto Andi (2004) “ *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* ” (Jakarta;Granit).

Salim (2008) “ *Metodologi Penelitian Kualitatif* ” (Bandung; Citapustaka Media).

Sukarni (2011) “ *Fiqh Lingkungan Hidup* ” (Jakarta; Pustaka Ilmu).

Sukiati (2016) *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Perdana Publishing: Medan).

Sumantri Arif (2010) “ *Kesehatan Lingkungan* ”.,(KENCANA;PT Kharisma Putra Utama).

Sutrisno Hadi (1967) “ *Metodologi Researchs* ( Jakarta : Erlangga).

Wawancara Pribadi dengan Delvi Suryani (Seorang Mahasiswi yang bertempat tinggal di Kecamatan Medan Area) Pada Tanggal 6 Desember 2020 Pukul 11:10 WIB.

Wawancara Pribadi dengan Ibu Lina Matondang Pada tanggal 16-01-2021

Wawancara Pribadi dengan Ibu Rina Hutabarat Pada tanggal 16-01-2021

Wikipedia diakses pada 12 Juni 2020 Pukul : 12;15 Wib

Zainuddin Ali(2016) “ *Metodologi Penelitian Hukum* ”, (Jakarta;Sinar Grafika, cet, 7).

## **B. Journal**

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman, *Melestarikan Lingkungan Hidup*,  
Disali dari Majalah *al-furqon* No.143 Ed.7 Th.Ke-13\_1435H Download

eBook Islam di *www.ibnumajjah.com*. Tanggal 15 April 2020 –Pukul 14:00

<https://pemkomedan.go.id/artikel-9137-jumlah-penduduk-medan-2983868-jiwa.html> di akses pada Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 13:01

Rifki Andika Journal “*Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Di Pasar Tradisional Sukaramai*” di akses pada hari Minggu Tanggal 24-01-2021.

### **C. Undang-Undang**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 7 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah.

Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Persampahan bagian kedua ayat (1),(2),(3),(4).

Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Status Sungai Deli dan Sungai Babura.

Undang – undang No. 8 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (d)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H ayat 1

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Pasal 6 Butir (d)

Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan Pasal 40 ayat (1), (2).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “*ketentuan pasal 1 angka 24*”.

## Lampiran Dokumentasi



## Lampiran Dokumentasi



Foto bersama saat wawancara dengan salah satu pedagang (Bapak M. Yakub Rahman)



Foto bersama saat wawancara dengan Kepala Seksi Operasional Pengelolaan Persampahan Dinas Kebersihan Kota Medan (Bapak Zainal Arifin, SE)



## Lampiran Dokumentasi




Baleho/Spanduk Larangan Buang Sampah di sekitar Bahu Jalan Pasar Sukaramai



## Lampiran Surat

11/5/2020 <https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTMyODg=>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371**  
**Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683**

---

Nomor : B.1172/FSH.I/PP.00.9/9/2020 06 November 2020  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:


<b>Nama</b>	: Anisa Apriana
<b>NIM</b>	: 0203163111
<b>Tempat/Tanggal Lahir</b>	: Medan, 15 April 1997
<b>Program Studi</b>	: Hukum Tatanegara (siyasah)
<b>Semester</b>	: IX (Sembilan)
<b>Alamat</b>	: JL. Wira Bakti Gang Almukhlisin Dusun IX Belakang Gudang Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang 20372 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Pinang Baris No.114, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERSPEKTIF FIQH DUSTURIYAH (STUDY KASUS DI PASAR SUKARAMAI KECAMATAN MEDAN AREA)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 06 November 2020  
 a.n. DEKAN  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

  
*Digitally Signed*  
**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**  
 NIP. 197505312007101001

Tembusan:  
 - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui hasil surat

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTMyODg=> 1/1



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

Jalan Pinang baris / Jalan T.B. Simatupang No. 114  
 Telepon : (061) 8458994 - 8452022 Fax : 8452022  
 Website : www.pemkomedan.go.id

Medan, 16 November 2020

Nomor : 070/5409  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran :  
 Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Bidang Akademik  
 Dan Kelembagaan UINSU  
 di -

Tempat

- Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/1433/Balitbang/2020 tanggal 11 November 2020 Hal Rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada :

Nama : Anisa Apriana

NIM : 0203163111

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum  
 UINSU

- Disampaikan kepada Saudara bahwa nama di atas diterima untuk melaksanakan penelitian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dan pada akhir waktunya menyerahkan hasil laporan penelitiannya melalui Kasubbag Umum.
- Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

A.n. KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN  
 PERTAMANAN KOTA MEDAN  
 SEKRETARIS



Tembusan :

- Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan (sebagai laporan)
- Pertinggal



**PEMERINTAH KOTA MEDAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693  
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/1433/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan UINSU. Nomor: B.1172/FSH.I/PP.00.9/9/2020 Tanggal: 06 November 2020 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Anisa Apriana.**  
NIM : 0203163111.  
Program Studi : Hukum Tatanegara (siyasah).  
Fakultas : Syariah dan Hukum.  
Lokasi : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.  
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.  
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan UINSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Medan.**  
Pada Tanggal : **11 November 2020**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan**  
Sekretaris,



**Tembusan :**

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan UINSU.
4. Pertinggal.